

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang menjalankan kegiatan bisnis secara terus menerus untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan yang dilakukan baik barang dan jasa. Perusahaan tidak hanya mencari keuntungan dalam bisnisnya, tetapi memastikan kegiatan perusahaannya dapat terus berjalan dan berkembang. Perusahaan yang besar memerlukan modal yang besar. Modal tersebut bisa didapatkan dari modal sendiri atau pemilik perusahaan, pinjaman bank, dan dana yang bersumber dari masyarakat. Modal yang didapatkan dari dana masyarakat bisa dihimpun dari perdagangan saham. Bursa efek Indonesia (BEI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas atas perusahaan-perusahaan yang memperdagangkan sahamnya di Negara Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di pasar saham atau bursa efek mendapatkan dana dari masyarakat atau yang disebut dengan investor. Perusahaan yang menjual sahamnya akan memaksimalkan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan menurut (Noerirawan & Muid, 2012) adalah pencapaian perusahaan selama menjalankan kegiatan bisnisnya. Nilai perusahaan di bursa efek menjadi bagian akhir dari proses perjalanan usaha.

Dengan meningkatnya daya beli investor di bursa efek akan menunjukkan nilai perusahaan. Pada saat perusahaan dapatkan untung yang besar maka nilai perusahaan akan meningkat. Meningkatnya nilai perusahaan akan menjadi perhatian investor. Dengan begitu nilai perusahaan mempunyai tujuan memaksimalkan keuntungan sehingga dapat mensejahterakan investor. Perusahaan yang memperdagangkan sahamnya akan bersaing dengan perusahaan lain. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Dalam (Muryati & Suardikha, 2014) dengan adanya perbedaan kepentingan diantara *agent* dan *principal* akan memunculkan konflik keagenan yang akan mempengaruhi pada nilai perusahaan. Untuk meminimalisir konflik keagenan tersebut perlu adanya perlindungan investor untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Salah satu tolak ukur dalam melindungi investor dengan

pengungkapan penerapan dari tata kelola perusahaan yang baik (Surbakti et al., 2017).

Tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance* sebuah konsep di mana pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Salah satu faktor *Good Corporate Governance* menjadi apakah nilai perusahaan dikatakan baik bagi para investor. *Good Corporate Governance* merupakan hubungan dimana para investor (*principal*), dewanllkomisaris atau pengawas dan dewan direksi (*agent*) dalam mengelola perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen yang menjalankan perusahaan (*agent*) tetapi para pemangku kepentingan seperti investor, dewan komisaris, dewan direksi dan kepemilikan institusional (*principal*). *Good Corporate Governance* menjadi satu hal yang sangat penting dalam perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* berarti mampu mengelola sumber daya yang ada di dalam perusahaan dan memberikan pengaruh pada keberhasilan perusahaan.

Pengungkapan *Good Corporate Governance* mempengaruhi nilai perusahaan dan menjadi tolak ukur dalam melindungi investor. Perusahaan yang mengungkapkan *Good Corporate Governance* menambah keyakinan para investor dalam menanamkan modal. (Ermaya et al., 2015) menyatakan munculnya *Good Corporate Governance* sebagai pilihan yang wajib, karena menjadikan *Good Corporate Governance* sangat berpengaruh dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* akan berjalan dengan baik jika Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional melakukan pengawasan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dewan komisaris mempunyai tugas dalam Mengawasi dan memberi nasihat kepada direktur dan memastikan tata kelola perusahaan yang baik dilaksanakan dengan baik (KNKG, 2006). Dewan komisaris diharapkan dapat melindungi kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan secara keseluruhan. Didalam (KNKG, 2006) dewan komisaris terdiri dari anggota komisaris independen. Menurut (Aggarwal, 2013) menyatakan komisaris independen memainkan peran penting dalam memantau dan memberi nasihat kepada manajemen perusahaan. Komisaris

independen eksternal sehingga tidak akan terpengaruh dalam mengambil keputusan. (Nurdin et al., 2018) komisaris independen dalam hal ini haruslah bersifat netral. Dengan komisaris independen yang netral diharapkan dapat mewakili kepentingan minoritas atau pemegang saham publik. Dengan demikian kepentingan investor sebagai pemegang saham publik yang lebih aman.

Dalam penelitian (Nurdin et al., 2018) prinsip-prinsip umum *Good Corporate Governance* dalam mengelola perusahaan dimana peran Komisaris Independen sangat diperlukan. Dewan Komisaris (sebagai pengawas) merupakan elemen utama dari *Corporate Governance* sebagai yang bertanggung jawab dalam memantau kualitas dan integritas laporan keuangan perusahaan dan mengawasi manajemen puncak, seperti yang didelegasikan oleh pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (KNKG, 2006).

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 PT. Garuda Indonesia dua anggota komisaris menolak melakukan penanda tangan laporan keuangan 2018. Chairal Tanjung dan Doni Oskaria dapat menungkapkan adanya kecurangan dalam laporan keuangan tahun 2018. Komisaris independen PT. Garuda Indonesia dalam hal ini tidak melakukan pengawasan dengan baik serta tidak memberikan nasihat terkait dengan laporan keuangan tersebut. Komisaris independen yang seharusnya bisa bersifat netral dan mampu mencegah hal tersebut dapat terjadi.

Dalam penelitian (Yuhasril, 2019) komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan *tobins'q*. Kemudian pada penelitian (Sarafina & Saifi, 2017) komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap *tobins'q* dan penelitian (Muryati & Suardikha, 2014) yang menyatakan sama bahwa dewan komisaris mempunyai pengaruh dalam nilai perusahaan. pada penelitian sebelumnya ada beberapa yang menyatakan adanya pengaruh negatif dan tidak memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan atas pengawasan dewan komisaris independen (Robayany et al., 2019), dan (Nurdin et al., 2018)

Laporan keuangan PT. Garuda Indonesia 2018 tidak hanya lolos dari pengawasan dewan komisaris tetapi juga lolos dari pengawasan komite audit. Komite audit yang dimana membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku (KNKG,

2006). Laporan keuangan PT. Garuda Indonesia 2018 seharusnya sudah diaudit oleh auditor eksternal dan komite audit. Komite audit yang seharusnya memperhatikan pencatatan akuntansi dalam laporan keuangan yang dibuat perusahaan khususnya PT. Garuda Indonesia dapat di koreksi sebelum dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Menurut (Laela Ermaya & Astuti, 2017) mekanisme *corporate governance* salah satunya komite audit yang ada dalam suatu perusahaan mampu mengurangi tindakan manipulasi laba oleh manajemen. Pada laporan keuangan 2018 PT. Garuda Indonesia komite audit dan auditor eksternal dapat meloloskan pengakuan pendapatan atas PT. Garuda Indonesia yang menjadikan laba pada tahun buku 2018. Pendapatan yang harusnya belum diakui pada tahun 2018 sudah diakui sebagai pendapatan.

Sementara itu Chairal Tanjung dan Doni Oskaria berpendapat lain. Pendapatan atas perjanjian kerja sama antara PT. Mahata Aero Teknologi dan PT. Citilink (anak perusahaan Garuda Indonesia) tidak bisa diakui sebagai pendapatan karena belum diterima uang sepersen pun. Hal ini tidak sesuai dengan pengakuan pendapatan di PSAK 23 paragraf 28 dan 29. Tidak hanya lolos dari pengawasan komisaris independen dan komite audit namun dewan direksi yang mengelola langsung perusahaan dipertanyakan integritasnya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Syafitri, 2018), (Sarafina & Saifi, 2017) dan (Istighfarin & Wirawati, 2015) yang menyatakan adanya pengaruh komite audit dengan nilai perusahaan. berbeda dengan (Muryati & Suardikha, 2014), yang tidak adanya pengaruh dalam pengawasan komite audit dalam hal ini menggunakan komite audit independen terhadap nilai perusahaan (Rimardhani et al., 2016) dan (Anggraini, 2013) juga berpendapat sama tidak adanya pengaruh terhadap nilai perusahaan dalam pengawasan yang dilakukan komite audit.

Pelaksanaan kegiatan perusahaan menjadi tanggung jawab dewan direksi yang menjadikan laporan keuangan harus dicatat sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Pencatatan atas pendapatan tersebut seharusnya bisa diketahui dewan direksi karena mereka yang menyetujui bahwa laporan keuangan yang dibuat telah sesuai dengan PSAK. (Muryati & Suardikha, 2014) menyatakan

dewan direksi mempunyai pengaruh dalam melakukan pengawasan kepada manajemen yang dapat merugikan perusahaan dan investor. Dalam hal ini dewan direksi seharusnya mengelola perusahaan dan membuat kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dewan direksi dalam tugasnya melakukan *internal control* dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Penyeludupan motor Harley Davidson dan sepeda brompton di dalam pesawat baru pesanan PT. Garuda Indonesia menambah panjang kasus yang dibuat burung baja berplat merah tersebut. Pengawas direksi atas internal control untuk menciptakan *Good Corporate Governance* tidak di laksanakan. Tidak hanya direksi PT. Garuda Indonesia empat direksi perusahaan BUMN yaitu direksi utama Angkasa Pura II dan Direktur utama PT. Industri Telekomunikasi Indonesia dalam operasi tangkap tangan kasus suap proyek *baggage handling system* (BHS), kemudian kasus suap Direktur utama PLN pada proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1 dan kasus Direktur utama PT. Pertamina yang telah merugikan negara terkait dengan eksplorasi migas di blok Manta Gummy di Australia. Sederet kasus tersebut adanya kelemahan penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan BUMN pada dewan direksi.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Vintilă & Gherghina, 2013) tidak adanya pengaruh dewan direksi dengan nilai perusahaan. namun penelitian lain menyatakan adanya pengaruh dewan direksi terhadap nilai perusahaan yang dilakukan oleh (Muryati & Suardikha, 2014), (Syafitri, 2018) dan (Isshaq et al., 2009).

Bagaimana dengan pengawasan yang diberikan pada pemegang saham institusi sebagai pihak yang paling berpengaruh pada nilai perusahaan dalam memberikan modal. Persentase kepemilikan institusional terhadap saham perusahaan dapat memberikan pengawasan yang lebih optimal kepada manajemen perusahaan (Wahab & Mulya, 2012). Pengawasan yang dilakukan kepemilikan institusional akan menjamin kemakmuran para investor dikarenakan mereka menjadi investor yang besar di bursa efek.

Menurut (Moradi et al., 2012) kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh investor institusi seperti perusahaan seperti asuransi, perusahaan investasi, dan bank. Namun menurut (Rimardhani et al., 2016)

kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki pemerintah, institusi yang berbadan hukum, institusi dari luar negeri dan lainnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusi merupakan kepemilikan institusi terhadap saham perusahaan. Chairal Tanjung dan Doni Oskaria merupakan perwakilan dari PT. Trans Airways dan Finegold Resources Ltd. yang mempunyai saham atas PT. Garuda Indonesia sebesar 28,08%. Chairul Tanjung dan Doni Oskaria dapat dikatakan menjadi pengawas institusional yang sekaligus menjadi anggota dewan komisaris berhasil mengungkapkan kecurangan PT. Garuda Indonesia.

Kasus lain yang berkaitan dengan kepemilikan institusional terjadi pada dua perusahaan asuransi milik BUMN yang mengalami kerugian atas investasi mereka yaitu PT. Jiwasraya di 13 perusahaan dan PT. Asabri di 14 perusahaan. Dalam penelitian (Ellili, 2011) investor institusional dapat melakukan pengawasan karena memiliki akses informasi yang lebih baik atas kinerja perusahaan. Kerugian yang dialami perusahaan PT. Jiwasraya dan PT. Asabri tersebut terjadi dikarenakan tidak berhati-hati dalam melakukan investasi. Dalam hal ini dewan komisaris ataupun dewan direksi yang melakukan pengawasan serta memberikan nasihat serta menjalankan perusahaan tidak mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan *Good Corporate Governance*.

Pada penelitian yang dilakukan (Muryati & Suardikha, 2014), (Gwenda & Juniartit, 2013) dan (tarjo, 2008) yang menyatakan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian sebelumnya ada yang berpendapat berbeda (Yuhartil, 2019), (Dewi & Nugrahanti, 2014) dan (Wongso, 2013) yang menyatakan tidak adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.

Tidak hanya faktor *Good Corporate Governance* yang memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan namun kinerja keuangan perusahaan juga memberikan dampak pada nilai perusahaan. Menurut (Pertiwi & Pratama, 2012) kinerja keuangan akan meningkatkan nilai perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan pencapaian perusahaan selama periode akuntansi. Laporan keuangan tersebut

digunakan untuk mendapatkan modal pinjaman dari bank dan institusi yang memberikan modal dalam bentuk saham.

Laporan keuangan merupakan pencapaian perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan kinerja perusahaan. Kinerja keuangan menjadi salah satu faktor yang paling penting bagi perusahaan, karena kinerja keuangan sebagai media perusahaan untuk melaporkan hasil dari proses pengelolaan sumber daya didalam perusahaan. Investor akan tertarik memberikan modalnya pada perusahaan yang menunjukkan kinerja perusahaan yang baik (Maryanti & Fithri, 2017). Gagal bayar polis asuransi nasabah yang terjadi pada PT. Jiwasraya dan PT. ASABRI terkait dengan kinerja keuangan. Gagal bayar tersebut disebabkan karenanya penurunan kinerja keuangan yang tidak sanggup membayar kewajiban kepada para nasabah. Penurunan kinerja keuangan disebabkan karena perusahaan menanamkan investasi pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek yang sedang mengalami penurunan kinerja. Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan dan menjadi hal positif bagi investor karena bisa mendapatkan deviden yang besar. Namun hal tersebut tidak terjadi pada PT. Jiwasraya dan PT. Asabri. PT. Asabri. Pada tahun 2017 mendapatkan keuntungan dari investasi mereka, sehingga laba PT. Asabri sebesar Rp.943,81 milyar. Namun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan pendapatan investasi. penurunan tersebut juga terjadi pada PT. Jiwasraya.

Tidak hanya perusahaan yang diinvestasikan PT. Jiwasraya dan PT. Asabri yang mengalami penurunan kinerja keuangan. Dalam hal ini kinerja keuangan merupakan pencapaian tujuan perusahaan dalam mencari keuntungan yang dapat dilihat dari pencapaian laba perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Surbakti et al., 2017) dan (Surbakti & Shaari, 2018) terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 25,12% dari 864 perusahaan yang *Go Public* mengalami kerugian pada laporan keuangannya, hal ini menunjukkan adanya kinerja keuangan yang tidak sehat.

Kinerja keuangan dapat diukur dengan beberapa pendekatan rasio keuangan yaitu rasio pasar, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. (Ermaya et al., 2015) profitabilitas adalah ukuran keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya dalam periode akuntansi. Menurut Simamora (2000: 528)

dalam (Ermaya et al., 2015) profitabilitas adalah ukuran fundamental dari keseluruhan keberhasilan perusahaan. Profitabilitas dapat memberikan keuntungan yang besar sesuai dengan apa yang diharapkan para investor. Dari pernyataan di atas, dapat menyimpulkan bahwa semua kebijakan dan keputusan dalam periode akuntansi disampaikan dalam laporan keuangan yang menjadikan pedoman apakah perusahaan itu menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Pendapatan yang diakui terkait dengan perjanjian kerja sama PT. Mahata Aero Teknologi dengan PT. Citilink Indonesia memberikan keuntungan kepada PT. Garuda Indonesia sebesar US \$ 239.940.000 dan keuntungan bagi hasil PT. Sriwijaya dan Garuda Indonesia sebesar US \$ 28.000.000. Kasus kecurangan atas pengakuan pendapatan PT. Garuda Indonesia tahun 2018 menjadi bukti bahwa kinerja keuangan harus terlihat baik atau menghasilkan laba agar nilai perusahaan juga tinggi. Berikut adalah jumlah perusahaan BUMN yang mengalami kerugian dari tahun 2014-2018.

Tabel.1 Jumlah Perusahaan BUMN yang Rugi

Tahun	Jumla Perusahaan
2014	25
2015	23
2016	21
2017	11
2018	12

Sumber : Kementrian BUMN

Tebel 1 menjelaskan adanya penurunan kinerja keuangan perusahaan BUMN yang menunjukkan jumlah yang terus menurun dan menandakan adanya peningkatan kinerja keuangan yang terus membaik. Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* akan memberikan pengelolaan perusahaan dengan mencapai keuntungan yang diharapkan.

Good Corporate Governance memunculkan adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* yang sejalan dengan konsep teori keagenan atau *Agency Theory*. Yang membuat adanya pengawasan kepada agent untuk mengurangi

konflik keagenan. Konflik keagenan timbul karena perbedaan kepentingan. Pemisahan kepentingan tersebut akan membuat adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan informasi yang diterima *principal* lebih sedikit dari pada *agent* yang mengetahui semua informasi di dalam perusahaan. Maka *Good Corporate Governance* ini menjadi konsep pengelolaan perusahaan yang baik antara dua belah pihak yang berbeda kepentingan (*agency problem*).

Dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dan menunjukkan perbaikan kinerja keuangan perusahaan akan menaikkan nilai perusahaan dan kepercayaan investor. Oleh karena itu penelitian ini penulis akan mengangkat variabel independen di dalam *Good Corporate Governance* yaitu Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional serta variabel independen yang muncul dari kepentingan *agent* yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan Profitabilitas (ROE). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Komisaris Independen mempengaruhi nilai perusahaan.
2. Apakah Dewan Direksi mempengaruhi Nilai Perusahaan.
3. Apakah Komite Audit mempengaruhi Nilai Perusahaan.
4. Apakah Kepemilikan Institusional mempengaruhi Nilai Perusahaan.
5. Apakah Kinerja Keuangan mempengaruhi Nilai Perusahaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
2. Mengetahui dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
3. Mengetahui komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
4. Mengetahui kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

5. Mengetahui kinerja keuangan yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Dengan tujuan dari penelitian ini yang telah dibuat maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada banyak pihak di antaranya :

1. Aspek Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pentingnya penerapan tata kelola untuk perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan pada perusahaan milik negara yang sudah *go public* dan belum *go public* terhadap nilai perusahaan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam ilmu tata kelola perusahaan dan ilmu akuntansi yaitu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para investor terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan dalam perusahaan milik negara yang *go public* dan yang belum *go public* terhadap nilai perusahaan
 - c. Memberikan referensi mengenai *Good Corporate Governance* pada penelitian-penelitian selanjutnya dan Kinerja Keuangan terhadap nilai perusahaan di perusahaan BUMN.
2. Aspek praktis
 - a. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* yang akan mempengaruhi pada nilai perusahaan dan pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan khususnya pada perusahaan BUMN.
 - b. Bagi Investor

Memberikan informasi kepada para investor agar dapat menentukan investasi dengan perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* serta melihat kinerja keuangan perusahaan yang stabil